



Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara (Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan di Pertamina)

Dava Vahreal Hartanto¹, Fariz Navrizal², Fernanda Surya³, Hajar Berlanty⁴, M Naufal⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 20, 2025
Revised May 09, 2025
Accepted May 27, 2025

Keywords:

Pancasila;
Keadilan sosial;
Korupsi;
Sumber daya Negara;
Pertamina.

ABSTRACT

Sumber daya alam dan aset negara merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara, yang digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara melalui studi kasus korupsi pengoplosan BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga. Kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan pancasila sila ke-5. Praktik pengoplosan yang dilakukan oleh oknum pejabat perusahaan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah dan menurunkan kualitas pelayanan produk. Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas kelembagaan yang menjadi faktor utama terjadinya korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan tata kelola BUMN untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara berjalan dengan adil dan transparan.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Dava Vahreal Hartanto
Universitas Negeri Malang,
65145 Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.
Email: davavahreal@gmail.com

1. INTRODUCTION

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya tersebut sering kali tidak dilakukan secara adil dan transparan. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah dugaan korupsi dalam pengelolaan BBM oleh oknum di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga, yang dikenal sebagai kasus "oplosan BBM".

Kasus ini tidak hanya merugikan ekonomi negara tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Masyarakat menjadi korban praktik curang tersebut dari mulai kerugian materiel risiko keselamatan sampai BBM yang tidak sesuai standar.

Pancasila yang sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengelolaan sumber daya negara. Khususnya pada sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang menekankan pentingnya mendistribusikan hasil kekayaan negara secara adil dan merata ke semua masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, dapat menjadi landasan dalam menegakkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya negara, dengan studi kasus korupsi BBM oplosan di PT Pertamina Patra Niaga sebagai ilustrasi pelanggaran nyata terhadap nilai tersebut.

Pancasila, ideologi negara Indonesia yang mengandung nilai fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang mengarahkan setiap kebijakan negara agar sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan. Pada sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, tanpa adanya diskriminasi dan ketimpangan. Prinsip ini sangat penting untuk pengelolaan sumber daya negara, yang harus dijalankan dengan adil dan transparan agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Keadilan sosial dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kemakmuran bersama, bukan untuk kemakmuran suatu instansi atau individu tertentu. Kasus korupsi dalam pengelolaan sumber daya negara seperti dalam sektor pertambangan dan energi, menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat merugikan negara serta masyarakat. Studi oleh Sachs (2021) menunjukkan bahwa negara-negara Skandinavia berhasil mengelola sumber daya publik dengan prinsip keadilan dan transparansi, berkat tata kelola dan pengawasan yang kuat.

Tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) sangat penting yang merujuk pada cara pemerintah menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta menghormati hukum. Dalam konteks pengelolaan sumber daya negara prinsip ini harus dipegang teguh untuk mencegah terjadinya korupsi dan ketidakadilan dalam pembagian kekayaan negara. Pemerintah harus memastikan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki negara dikelola dengan baik dan menguntungkan semua rakyat, bukan hanya menguntungkan suatu instansi atau individu tertentu. Komparasi dengan Norwegia dalam pengelolaan Norwegian Government Pension Fund menunjukkan bahwa integritas sistem dan pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di sektor energi (Norwegian Ministry of Finance, 2023).

2. RESEARCH METHOD

2.1 Studi Kasus: Korupsi Pengoplosan BBM di PT Pertamina (2018–2023)

Kronologi dan Modus

Pada periode 2018 hingga 2023, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga dan anak perusahaannya. Modus utama yang digunakan adalah penurunan produksi kilang secara sengaja, sehingga Pertamina lebih banyak mengandalkan impor minyak mentah melalui perantara atau broker dengan harga yang telah dimanipulasi. Sementara itu pasok minyak mentah dalam negeri sudah sesuai spesifikasi kilang.

Selain itu, ditemukan praktik pengoplosan BBM, di mana BBM jenis Pertamina (RON 92) dicampur dengan bahan bakar beroktan lebih rendah, seperti Premium (RON 88), untuk menekan biaya produksi. Praktik ini menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp17,4 triliun per tahun.

2.2 Dampak dan Kerugian

Praktik korupsi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, dengan total kerugian mencapai Rp193,7 triliun, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai BUMN strategis. Konsumen dirugikan karena membeli BBM dengan harga tinggi namun kualitasnya tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, kerugian lingkungan dan potensi kerusakan mesin kendaraan akibat BBM oplosan menjadi perhatian serius.

2.3 Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab

Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini, terdiri dari enam pejabat Pertamina dan tiga dari pihak swasta. Di antara pejabat yang terlibat adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan serta beberapa direktur lain di anak perusahaan Pertamina. Dari pihak swasta, tersangka berasal dari perusahaan broker yang diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pejabat Pertamina.

Meskipun proses hukum sedang berjalan, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Selain itu, perlu ada reformasi struktural dalam tata kelola Pertamina untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

3.3 RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1 Studi Kasus (Korupsi BBM Oplosan di PT Pertamina Patra Niaga)

Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang melibatkan praktik pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM). Modus yang digunakan adalah mencampur Pertamina RON 92 dengan RON yang lebih rendah seperti premium RON 88, untuk menekan biaya produksi yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah per tahun. Praktik ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun selama periode 2018–2023 (Kompas.com, 2025).

Telah ditetapkan sebanyak sembilan orang tersangka dalam kasus ini, termasuk enam pejabat Pertamina Patra Niaga dan tiga dari pihak swasta. Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pertamina dan mempertimbangkan penggantian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

3.2 Analisis

3.2.1 Dampak Ekonomi dan Sosial

Akibat dari kasus korupsi pengoplosan BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga telah menyebabkan kerugian negara yang sangat signifikan hingga mencapai Rp193,7 triliun selama periode 2018-2023, menurut Kompas.com. Selain merugikan negara, juga merugikan konsumen karena telah membayar harga lebih tinggi untuk kualitas BBM yang kualitasnya lebih rendah yang berakibat pada kinerja mesin pada kendaraan dan efisiensi bahan bakar. Secara sosial, ketidakadilan distribusi dan manipulasi kualitas BBM memperlebar jurang ketimpangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN.

3.2.2 Kelemahan Tata Kelola dan Pengawasan

Praktik pada pengoplosan BBM ini mencerminkan kelemahan tata kelola serta pengawasan internal pada Pertamina. Temuan dari Universitas Indonesia (2024) menyebutkan bahwa tidak adanya mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblower system) yang efektif menjadi salah satu penyebab lemahnya transparansi di internal BUMN. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan dan pertanggungjawaban di dalam perusahaan.

3.3.3 Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Kepercayaan Publik

Kasus korupsi pada Pertamina ini juga berdampak pada penegakan hukum dan institusi negara. Penetapan sembilan tersangka, termasuk enam eksekutif senior dari anak perusahaan Pertamina serta tiga individu dari pihak swasta, ini menunjukkan adanya keterlibatan yang luas dari pihak luar dalam praktik korupsi ini. Hal ini menuntut penegakan hukum yang tegas dan transparan untuk memulihkan kepercayaan publik.

4. CONCLUSION

Kasus korupsi pengoplosan BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh Pancasila. Praktik manipulasi nilai oktan untuk meraih keuntungan suatu instansi atau individu tidak hanya merugikan negara tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi perusahaan milik negara. Lemahnya sistem pengawasan internal dan tata kelola pemerintah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus korupsi. Keterlibatan sejumlah pejabat dari pihak swasta juga memperlihatkan adanya jaringan penyimpangan yang kompleks dan terorganisir. Penegakan keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara tidak hanya membutuhkan sanksi hukum yang tegas, tetapi juga reformasi tata kelola di dalam pemerintahan serta pengawasan yang ketat. Upaya pencegahan melalui edukasi nilai-nilai Pancasila dan penguatan pengawasan merupakan langkah penting untuk pencegahan terjadinya kasus korupsi di masa mendatang. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan, membangun sistem transparansi, serta menanamkan nilai-nilai etika Pancasila dalam manajemen institusi negara.

References

FIA UI. (2025). *Kasus dugaan korupsi di Pertamina bukti lemahnya pengawasan*. <https://fia.ui.ac.id/pengamat-kasus-dugaan-korupsi-di-pertamina-bukti-lemahnya-pengawasan>.

- FMIPA UNESA. (2025). *Kasus BBM oplosan Pertamina: Mengungkap modus dan dampak nilai oktan bagi kendaraan*. <https://Pendidikan-Sains.Fmipa.Unesa.Ac.Id/Post/Kasus-Bbm-Oplosan-Pertamina-Mengungkap-Modus-Dan-Dampak-Nilai-Oktan-Bagi-Kendaraan>.
- Hatane, S. E. (2023). Keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam: Kajian terhadap praktik korupsi di Indonesia. *Jurnal Matakao: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 145–160.
- Hukumonline. (2025). *Begini modus oplosan BBM dalam kasus korupsi minyak mentah*. <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Begini-Modus-Oplosan-Bbm-Dalam-Kasus-Korupsi-Minyak-Mentah-Lt67be950ce2a89/>.
- Karimi, S. (2024). Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme Global. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4, 1–10. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4iX.526>
- Kompas.com. (2025). *Kasus dugaan korupsi Pertamina, apa saja yang perlu diketahui?* . <https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2025/02/26/050000265/Kasus-Dugaan-Korupsi-Pertamina-Apa-Saja-Yang-Perlu-Diketahui>.
- Kompasiana. (2025). *Analisis hukum pidana terhadap kasus korupsi di PT Pertamina tahun 2025*. <https://Www.Kompasiana.Com/Arrmaprastyo6503/67f7700234777c4d26026a82/Analisis-Hukum-Pidana-Terhadap-Kasus-Korupsi-Di-Pt-Pertamina-Tahun-2025>.
- Okezone Nasional. (2025, February 25). *Kasus korupsi Pertamina rugikan negara Rp193,7 triliun, petinggi oplos BBM Pertalite jadi Pertamina*. <https://Nasional.Okezone.Com/Read/2025/02/25/337/3117296/Kasus-Korupsi-Pertamina-Rugikan-Negara-Rp1937-Triliun-Petinggi-Oplos-Bbm-Pertalite-Jadi-Pertamax>.
- Pratama, R. (2025). Skandal BBM oplosan: Kerugian triliunan dan dampak bagi konsumen. *Jurnal Palembang*.
- Puspasari, D., & Suhardjono, S. (2020). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(1), 37–46.
- Sudrajat, J. A., Ramadhani, K., Riyano, K. R. P., & Antoni, H. (2024). Peran Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial di era digital. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 10(3), 1–10.
- Sutrisno. (2025). Mengungkap berbagai skandal korupsi di Pertamina, dari oplos BBM hingga penggelapan dana pensiun. *Jurnal News*.
- Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2025). *Modus korupsi Pertamina: Oplos Pertalite jadi Pertamina*. https://Umj.Ac.Id/Just_info/Modus-Korupsi-Pertamina-Oplos-Pertalite-Jadi-Pertamax/.